**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGENG HARIADI, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 17 Desember 2025,

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |
| (SUGENG HARIADI, S.H., M.H.) | (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) |

# PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2025

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil | Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI | 73 |
| 2 | Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan | Persentase peningkatan pengendalian perkara | 61% |
| | | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum | 90% |
| | | Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara | 84% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3 | Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal | 80% |
| 4 | Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel | Indeks reformasi birokrasi | 84 |
| | | Tingkat penerapan etika profesi jaksa | 80% |

| No | Program | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.021.059.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 9.833.871.000 |
| | Jumlah | Rp. 10.854.930.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Batang Hari.

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jambi, 17 Desember 2025,

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |
| (SUGENG HARIADI, S.H., M.H.) | (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | TITO SUPRATMAN, S.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjían ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI, | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (TITO SUPRATMAN, S.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan | 80% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan | 80% |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi | 88% |
| 2 | Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien | Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai | 61% |
| 3 | Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan | Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System | 85% |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum | Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum | 3,6 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | 80% |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pra Penuntutan | 15.060.000 |
| 2 | Penuntutan | 196.214.000 |
| 3 | Eksekusi | 17.000.000 |
| 4 | Restorative Justice | 2.200.000 |
| Jumlah | | 230.474.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI, | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (TITO SUPRATMAN, S.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**
**KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien | Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai | 61% |
| 2 | Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU | 77% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan | 84% |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional | TPPU | |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU | 84% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU | 84% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU | 20% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat | 85% |
| | | Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus | 72% |
| 3 | Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus | Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU | 27% |
| | | Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara) | 35% |
| 4 | Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan | Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System | 85% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum | Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum | 3,6 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | *Tingkat utilisasi sarana dan prasarana* dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | 80% |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | PENYELIDIKAN | 74.882.000 |
| 2 | PENYIDIKAN | 83.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | PRA PENUNTUTAN | 13.021.000 |
| 4 | PENUNTUTAN | 156.396.000 |
| 5 | EKSEKUSI | 15.802.000 |
| Jumlah | | 343.101.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MULKAN BALYA, S.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI, | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (MULKAN BALYA, S.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**
**KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara | Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer | 100% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara | Indeks Persepsi atas pelayanan hukum | 3,6 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata | Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata | 80% |
| | | Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata | 80% |
| 4 | Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional | Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi | 80% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi | 80% |
| | | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi | 80% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum | Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum) | 3,6 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum | Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum | 3,6 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Batang Hari | 80% |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penanganan Perkara Perdata dan TUN | 54.300.000 |
| 2 | Pelayanan Hukum Gratis | 7.200.000 |
| 3 | Pertimbangan Hukum | 14.000.000 |
| 4 | Pengelolaan HALO JPN | 6.000.000 |
| 5 | Pendampingan Pengelolaan Dana Desa | 28.000.000 |
| Jumlah | | 109.500.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI, | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (MULKAN BALYA, S.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI INTELIJEN |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI INTELIJEN, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.) |

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
## KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan | Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum | 80% |
| | | Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum | 3,6 |
| 2 | Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan | Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan | 80% |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Batang Hari | 80% |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan | 40.000.000 |
| 2 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat | 52.008.000 |
| 3 | Kampanye Anti Korupsi | 18.000.000 |
| 4 | Penerangan Hukum | 34.976.000 |
| 5 | Jaksa Masuk Sekolah | 28.000.000 |
| 6 | Jaksa Menyapa | 24.400.000 |
| Jumlah | | 197.384.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI INTELIJEN, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H.,M.M.) | (MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H.,M.H.,M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI, | KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H.,M.H.,M.M.) | (LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK,S.H.,M.H.) |

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
## KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI | Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Batang Hari | 95 |
| 2 | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI | Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari | 90 |
| 3 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI | Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur | 80% |
| 4 | Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan | Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan | 3,6 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | manajemen dan kesehatan yustisial | Negeri Batang Hari | |
| 5 | Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI | Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan | 50% |
| 6 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Batang Hari | 80% |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Layanan Umum | 39.194.000 |
| 2 | Operasional Perkantoran | 2.364.000.000 |
| 3 | Gaji dan Tunjangan | 7.243.677.000 |
| 4 | Pengadaan Peralatan Fasilitas kantor | 187.000.000 |
| Jumlah | | 9.833.871.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI, | KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H.,M.H.,M.M.) | (LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK,S.H.,M.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | RONY KURNIAWAN, S.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M. |
| Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BB, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (RONY KURNIAWAN, S.H.) |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**
**KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi | Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset | 90% |
| | | Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana | 90% |
| | | Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana | 90% |
| 2 | Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang | Tingkat efektivitas pengelolaan Barang Bukti | 4,0 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | transparan, akuntabel, dan modern | Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara | 4,0 |
| | | Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi | 4,0 |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | PEMELIHARAAN | 70.475.000 |
| 2 | PEMUSNAHAN | 31.000.000 |
| 3 | PENYELESAIAN BARANG BUKTI/SITAAN/ RAMPASAN | 38.525.000 |
| Jumlah | | 140.000.000 |

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 18 Desember 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI | KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BB, |
| (ERIK MEZA NUSANTARA, S.H., M.H., M.M.) | (RONY KURNIAWAN, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Shahnaz Natasha, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, | Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, |
| (Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.) | (Shahnaz Natasha, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat .<br>Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Operasional Kegiatan Penyidikan | 85 |
| | | Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. | 85 |
| | | PersentasePerkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan. | 85 |

| No | Rincian Output |
|---|---|
| 1 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Batang Hari |
| 2 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batang Hari |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, | Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, |
| (Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.) | (Shahnaz Natasha, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Selvi Riyani, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tito Supratman, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, | Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum, |
| (Tito Supratman, S.H.) | (Selvi Riyani, S.H., M.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum | Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan | 90 |
| | | Persentase perkara tindak pidana umum yang in kracht van gewusjdezaak (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi | 90 |

| No | Rincian Output |
|---|---|
| 1 | Perkara Pidana Umum dalam Tahap Penuntutan dalam Kejaksaan Negeri Batang Hari |
| 2 | Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri Batang Hari |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, | Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum, |
| (Tito Supratman, S.H.) | (Selvi Riyapi, S.H., M.H.) |

Dipindai dengan CamScanner

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Samuel Joshida, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, | Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, |
| (Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.) | (Samuel Joshida, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesiakan pada tahap pra penuntutan. | **85** |
| | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesiakan pada tahap penuntutan. | 85 |
| | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. | 85 |
| | | Persentase pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus | **85** |
| 2 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara *Tindak Pidana Khusus* (Kepabeanan, Cukai, Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional. | Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. | **85** |
| | | Persentase perkara tindak pidana *khusus (Kepabeanan, Cukai, dan* Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan. | |
| | | Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi. | |

| No | Rincian Output |
|---|---|
| 1 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batang Hari |
| 2 | Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
| --- | --- |
| Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, | Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi, |
| (Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.) | (Samuel Joshida, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Rezky Utomo, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Intelijen |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Intelijen, | Kepala Subseksi II |
| (Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.) | (Rezky Utomo, S.H., M.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis | Presentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis | 100% |
| 2 | Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Presentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 100% |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan | Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan | - |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan | 20.000.000 |
| Jumlah | | 20.000.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Intelijen, | Kepala Subseksi II, |
| (Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.) | (Rezky Utomo, S.H., M.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PRANA SURYA RAMADHAN, S.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MULKAN BALYA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| | |
|---|---|
| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
| Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, | Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum, |
| (Mulkan Balya, S.H., M.H.) | (Prana Surya Ramadhan, S.H.) |

***PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025***

**KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain | Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain | 95% |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara | 90% |

| No | Rincian Output | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pertimbangan Hukum | 10.200.000 |
| 2 | Pengelolaan HALO JPN | 6.000.000 |
| 3 | Pendampingan Pengelolaan Dana Desa | 22.000.000 |
| Jumlah | | 38.200.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, | Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum |
| (Mulkan Balya, S.H., M.H.) | (Prana Surya Ramadhan, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dimas Febry Kustantyo, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Intelijen |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Intelijen, | Kepala Subseksi I |
| (Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.) | (Dimas Febry Kustantyo, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan | - |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan | Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan | - |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen | - |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum | Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum | 100 % |
| 5 | Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Presentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 100 % |
| 6 | Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | Presentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 100 % |
| 7 | Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum | 84 |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan | 20.000.000 |
| 2 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat | 52.008.000 |
| 3 | Kampanye Anti Korupsi | 18.000.000 |
| 4 | Penerangan Hukum | 34.976.000 |
| 5 | Jaksa Masuk Sekolah | 26.000.000 |
| 6 | Jaksa Menyapa | 23.400.000 |
| Jumlah | | 174.384.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| | |
|---|---|
| Pihak Kedua,<br>Kepala Seksi Intelijen, | Pihak Pertama,<br>Kepala Subseksi I, |
| (Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.) | (Dimas Febry Kustantyo, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | AMIN LUTFI, S.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MULKAN BALYA, S.H., M.H. |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, | Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara, |
| (Mulkan Balya, S.H., M.H.) | (Amin Lutfi, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi | 85% |
| | | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi | 95% |
| | | Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaiakan melalui jalur Litigasi | 85% |

Dipindai dengan CamScanner

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata | Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata | 85% |

| No | Rincian Output | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Penanganan Perkara Perdata dan TUN | 25.000.000 |
| 2 | | |
| Jumlah | | 25.000.000 |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, | Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara, |
| (Mulkan Balya, S.H., M.H.) | (Amin Lutfi, S.H.) |

Dipindai dengan CamScanner

# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Azzkya Mursalim, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum |

Selanjutnya disebut pihak pertama

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tito Supratman, S.H. |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, | Kepala Subseksi Prapenuntutan |
| (Tito Supratman, S.H.) | (Azzkya Mursalim, S.H.) |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
# KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

## A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

## B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## C. KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif | Jumlah Pemberian Pertimbangan Hukum pada Persidangan Perkara Pidana Umum pada Tahap Pra Penuntutan | 90 |
| | | Jumlah Pengiriman Berkas Perkara kepada Penyidik dalam rangka persidangan perkara Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan | 90 |

| No | Rincian Output |
|---|---|
| 1 | Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari |
| 2 | Pertimbangan Hukum yang diberikan pada Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Umum pada Tahap Pra Penuntutan |

## D. PRIORITAS NASIONAL

-

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 12 September 2025

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Kepala Subseksi Pra Penuntutan, |
| (Tito Supratman, S.H.) | (Azzkya Mursalim, S.H.) |